



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

# **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Penelitian terdahulu**

Dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan Tvri Pusat*, Madrid De Fretes & Retor A.W. Kaligis (2020) mencari tahu implementasi teori pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan TVRI sebagai lembaga pelayan publik. Madrid De Fretes & Retor A.W. Kaligis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa TVRI sudah menjalani prinsip utama dalam teori pers tanggung jawab sosial, yaitu menerima dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan sudut pandang sebagai bentuk kontrol masyarakat untuk membangun TVRI yang lebih baik, menghindari pemberitaan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Namun di sisi lain, TVRI belum mampu mengelola medianya sendiri sehingga tidak bebas dari intervensi politik. Di sini, TVRI disimpulkan menjadi media yang menyediakan pemberitaan, tapi tidak melakukan kontrol kepada pemerintah.

Penelitian ini memiliki latar belakang dari TVRI memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan memiliki status sebagai lembaga penyiaran publik, tapi beberapa aksi TVRI ditegur karena menyalahi tanggung jawab tersebut. TVRI pernah terbukti melanggar asas netralitas pada November 2013 karena menyiarkan konvensi partai Demokrat. Padahal, TVRI seharusnya mengacu pada undang-undang penyiaran yang menyatakan bahwa media tersebut harus bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk melayani masyarakat. Kasus ini pun bukan yang pertama kali. Kasus TVRI lainnya adalah terbukti

bersalah menyiarkan visualisasi seseorang yang mengonsumsi sabu-sabu oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada Agustus 2018.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa TVRI tidak mengamalkan teori tanggung jawab sosial. Hal ini dirasakan sebagai masalah karena TVRI berstatus sebagai lembaga pelayan sosial yang bertugas melayani masyarakat, bukan alat kepentingan elit politik. Dan justru, kehadiran pers sangat dibutuhkan untuk mengawasi atau mengontrol gerak pemerintah agar menjadi lebih transparan serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Madrid De Fretes dan Retor A.W. Kaligis menganggap bahwa seharusnya TVRI sebagai lembaga pelayan publik memiliki tanggung jawab sosial, yakni mampu mandiri mengelola lembaganya sendiri sebagai lembaga pelayan publik, sesuai dengan pemikiran McQuail (2010, p.196). Namun pada kenyataannya, TVRI

Hasil penelitian didominasi dengan penjelasan bahwa TVRI masih belum bisa melakukan fungsinya memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Fungsi ini meliputi berperan sebagai media yang bertanggung jawab sosial. Hal ini karena TVRI masih sangat tergantung dengan pemerintah. Ketergantungan ini terlihat dari anggaran TVRI yang berasal dari APBN dan mayoritas SDMTVRI sebagai PNS yang berada di pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Padahal, salah satu bentuk tanggung jawab sosial media menurut McQuail (2010, p.196) adalah media harus mampu mandiri mengelola dirinya sendiri dengan dana publik, dan memiliki keleluasaan editorial dan kinerja yang mandiri. Seharusnya, pemerintah hanya berperan sampai pada penetapan TVRI sebagai lembaga, menyerahkan TVRI untuk mengelola dirinya sendiri.

Walaupun tidak mudah, TVRI berupaya mengikuti UU Penyiaran untuk berfungsi sebagai media hiburan, media informasi, media perekat sosial, dan media pendidikan.

Namun, tanpa memecahkan masalah ketergantungan TVRI sehingga tidak bisa independen dan lepas dari pengaruh pemerintah, TVRI akan sulit untuk bertanggung jawab kepada masyarakat secara maksimal. Selama TVRI belum bisa mengelola dirinya sendiri secara mandiri, upaya TVRI menyajikan konten yang berkualitas dan berdaya akan sulit dilakukan karena terhalang oleh kebijakan pemerintah yang membiayai mereka.

Salah satu metode penelitian dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam terhadap informan utama yang memiliki kriteria sebagai pihak yang terlibat dalam kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberitaan TVRI. Informan-informan utama ini meliputi: Kepala Bidang Berita TVRI Pusat, Kepala Seksi *Current Affairs*, Kepala Bidang Pengkajian Program dan Berita, Produser di divisi *Current Affairs*, mantan Dewan Pengawas di TVRI, dan pejabat dalam Komisi I DPR RI. Pertanyaan yang terkandung dalam wawancara mendalam penelitian ini menggunakan enam ciri-ciri teori pers tanggung jawab sosial oleh McQuail (2010, p.226): (1) Media mau menerima dan memenuhi kewajiban dalam masyarakat. (2) Kewajiban dipenuhi dengan standar yang tinggi atau profesionalitas tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan juga keseimbangan. (3) Media sudah harus mandiri dalam hal mengatur diri sendiri didalam kerangka hukum serta lembaga yang ada. (4) Media sebaiknya menghindari segala hal yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidak tertiban umum atau penghinaan terhadap kaum minoritas etnik maupun juga agama. (5) Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebinekaan, dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab. (6) Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan profesionalitas mengutamakan kepentingan bersama.

Penelitian ini dijadikan acuan dalam mengeksekusi penelitian untuk mencari tahu apakah teori pers tanggung jawab sosial diimplementasikan oleh *Kompas.id* atau tidak. Pemakaian ciri-ciri media yang memakai teori pers tanggung jawab sosial sebagai panduan melakukan wawancara mendalam membantu peneliti untuk menetapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan cara untuk menarik kesimpulan berdasarkan jawaban para subjek riset. Tak hanya itu, penelitian ini bisa memperluas penelitian terdahulu ini karena meneliti media *online* berbayar *Kompas.id* yang secara formal tidak berperan sebagai lembaga pelayan publik. Penelitian ini bisa menemukan penyebab lain yang mempengaruhi implementasi teori pers tanggung jawab sosial pada suatu media.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rachel E. Khan, Kristel B. Limpot dan Gillian N. Villanueva, berjudul *Social Responsibility Theory of the Press and Its Effect on Framing TV News about Children*. Penelitian ini bertujuan apakah panduan meliput anak-anak yang ditetapkan oleh Badan Internasional PBB tentang Dana Darurat untuk Anak-Anak atau United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) mempengaruhi bagaimana media di Filipina melakukan *framing* dalam meliput tentang anak-anak di televisi atau tidak. Singkat kata, ditemukan bahwa panduan UNICEF mempengaruhi *framing* media Filipina di televisi dalam meliput tentang anak-anak secara umum, tapi masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Hal ini melihat masih adanya beberapa pelanggaran panduan peliputan anak.

Sejak pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau yang lebih dikenal sebagai UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), usaha global di dunia banyak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak melalui penghormatan

martabat mereka sebagai individu, termasuk hak anak-anak untuk dilindungi dari siksaan, pengabaian, eksploitasi, dan diskriminasi.

Penandatanganan UNICEF mencatat bahwa media memiliki fungsi yang esensial dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak fundamental anak. Hal ini karena media dianggap bisa membentuk persepsi publik untuk menghormati anak, tetapi bisa juga membentuk prasangka dan stereotipe yang memberikan persepsi buruk bagi publik dan politikus. Peliputan yang baik dan benar dinilai akan menguntungkan perjuangan hak anak. Integritas anak harus dilindungi ketika terlibat dengan aksi kriminal, seperti pelecehan seksual dan masalah keluarga.

Melihat hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi teori pers tanggung jawab sosial ketika melakukan *framing* berita tentang anak, terutama pada peliputan anak dalam program berita televisi waktu penayangan utama.

Menurut McQuail, salah satu kewajiban media dalam teori pers tanggung jawab sosial adalah berupaya menghindari kontroversi dalam bidang jurnalistik, seperti bias, pelanggaran privasi, misinformasi, pelanggaran standar selera publik, dan pembungkaman materi yang tidak sesuai dengan minat penerbit untuk diterbitkan.

Pada 2003, UNICEF berkonsultasi dengan berbagai organisasi jurnalistik, mengeluarkan panduan untuk membantu jurnalis ketika meliput anak. Panduan tersebut berfungsi sebagai landasan etis untuk meliput anak-anak, sesuai dengan kepentingan publik dan hak anak. Dalam buku *Journalism, Ethics and Regulation*, professor studi media Chris Fort menilai jurnalis harus berhati-hati dan sadar ketika meliput tentang orang-orang yang rentan. Mereka yang rentan secara inheren meliputi etnis minoritas dan anak-anak (Frost dalam Khan, Limpot, dan Villanueva, 2020, p.3).

Dalam panduan UNICEF, terdapat tujuh poin utama: (1) Jangan melakukan stigmatisasi lagi kepada anak, (2) selalu sajikan konteks yang akurat dalam berita atau foto anak, (3) selalu ganti nama dan tampilan visual anak, terutama jika anak tersebut adalah korban atau pelaku pelecehan seksual, positif HIV, kriminal, kombatan atau mantan kombatan yang memegang senjata, (4) dalam situasi dengan potensi risiko kerugian tertentu, ganti nama dan kaburkan identitas visual untuk setiap anak yang teridentifikasi sebagai mantan kombatan yang tidak memegang senjata, tetapi rentan, seperti pencari suaka, pengungsi, dan terlantar, (5) dalam kasus tertentu, penggunaan nama dan identitas visual anak harus dilakukan untuk kepentingan anak, anak masih harus dilindungi dan didukung melawan stigma, (6) mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh anak, bisa dari anak yang lain atau orang dewasa, lebih baik keduanya, dan (7) ketika ragu apakah seorang anak sedang mengalami risiko atau tidak, laporkan situasi umum tentang anak-anak daripada anak perseorangan, terlepas dari nilai berita yang muncul.

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian. Pertama, menganalisis dua program berita waktu tayangan utama di Filipina, yaitu *TV Patrol* dan *24 Oras*. Kedua, melakukan wawancara semi-struktur terhadap jurnalis penyiaran untuk mengetahui perspektif jurnalis ketika meliput anak-anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada implementasi teori pers tanggung jawab sosial telah meningkat selama satu dekade terakhir walaupun masih banyak yang masih bisa ditingkatkan lagi. Hal ini melihat pelanggaran panduan peliputan oleh *TV Patrol* dan *24 Oras* sebanyak 10,26% dan 20% secara berurutan pada Januari-Februari 2019. Walaupun ada peningkatan berita baik tentang anak, sebagian besar beritanya membahas kriminalitas. Nama orangtua, wakil, dan guru ditemukan seharusnya juga dilindungi untuk melindungi

identitas anak. Di sisi lain, nama samaran, gambar atau video buram yang aman (tanpa wajah) menjadi lebih umum digunakan. Terlebih lagi, jurnalis menjadi lebih sadar pentingnya meminta persetujuan orangtua sebelum mendekati anak di bawah umur untuk wawancara. Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa jurnalis secara umum sadar akan faktor etis yang terlibat ketika meliput anak-anak, tapi kurang konsisten dalam mengikuti panduan UNICEF.

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengamati implementasi teori pers tanggung jawab sosial adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian wawancara. Dengan mewawancarai jurnalis yang terlibat dalam pembuatan berita, bisa diketahui pandangan jurnalis terkait teori pers tanggung jawab sosial dan kesimpulan bisa ditarik berdasarkan jawaban-jawaban jurnalis ketika menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Hasil penelitian bisa berupa seberapa jurnalis sadar akan pentingnya teori pers tanggung jawab sosial atau menarik perspektif baru terkait teori pers tanggung jawab sosial.

Penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rebecca Coates Nee, berjudul *Social responsibility theory and the digital nonprofits: Should the government aid online news startups?* Penelitian di Amerika Serikat ini bermaksud untuk memahami bagaimana para pemimpin outlet berita nirlaba di Amerika Serikat menganggap bagaimana seharusnya pemerintah lokal, negara bagian, dan federal berperan dalam mendukung operasi mereka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara terhadap 10 editor dari sembilan outlet media digital nirlaba. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu (1) mengetahui cara pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung



untuk membantu organisasi berita dan (2) mengetahui anggapan para editor tentang jenis bantuan yang dibutuhkan untuk mendukung misi mereka, yaitu jurnalisme layanan publik.

Penelitian memiliki latar belakang tentang kondisi media di Amerika Serikat. Walaupun negara itu masih mendukung teori libertarian yang mendukung pendekatan pasar untuk mengelola media, teori pers tanggung jawab sosial membuka kemungkinan pemerintah melakukan intervensi ketika media swasta gagal menyediakan fungsi pelayanan publik yang penting bagi demokrasi. Fungsi yang dimaksud adalah meminta pertanggungjawaban pemerintah dan pejabat publik, mendorong wacana publik, dan menginformasikan pemilih pemilu. Tanpa fungsi ini, hakikat demokrasi Amerika Serikat terancam.

Untuk itu, salah satu solusi yang dikemukakan adalah meningkatkan dukungan untuk outlet media-media nirlaba lokal dan wilayah yang mulai bermunculan pada 2005. Media-media digital nirlaba ini banyak menerima dana filantropi dan hibah yayasan. Media *online* nirlaba dilaporkan dengan baik memiliki potensi untuk menutupi kekurangan media komersial, tapi stabilitas finansial masih menjadi kekhawatiran bagi media-media nirlaba tersebut. Terlepas dari pujian dari pihak lain terkait layanan publik media digital nirlaba, media nirlaba tersebut tetap tidak menerima rekomendasi dukungan pemerintahan walaupun sudah diakui mengalami kerentanan keuangan. Hal ini disayangkan banyak akademisi karena dianggap kuno dan meremehkan krisis media yang dianggap berbahaya bagi demokrasi.

Selain itu, media nirlaba digital mengalami banyak tantangan. Meskipun jumlah penonton pembaca situs berita komunitas meningkat, kesulitan pendanaan membuat media digital nirlaba memberhentikan karyawannya dan bergabung dengan media nirlaba lainnya.

Melihat ini, Rebecca Coates Nee menganggap penting untuk mengetahui bagaimana pemimpin media digital nirlaba melihat peran pemerintah untuk membantu mereka bertahan. Hal ini karena media digital nirlaba dinilai dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan memperkuat demokrasi dan diperlukan untuk berdiskusi lebih lanjut terkait transisi model komunikasi publik kepada masyarakat Amerika Serikat.

Dengan itu, Rebecca Coates Nee melakukan penelitian kualitatif dengan metode penelitian wawancara mendalam terhadap 10 editor dari sembilan media digital nirlaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa outlet media digital nirlaba menggambarkan praktik teori pers tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh Siebert (1956, p.73). Para pemimpin media digital nirlaba berharap anggota komunitas bisa melihat nilai dalam pekerjaan mereka dan merespons dengan donasi moneter. Namun, teori ekonomi berita mendeskripsikan sulitnya memonetasi jurnalisme pelayan publik yang sangat bergantung dengan subsidi publik atau swasta.

Para partisipan penelitian mengakui bahwa melakukan diversifikasi sumber pendapatan mereka adalah hal yang sangat menantang. Mereka lemah dengan ketergantungan pada pendanaan filantropi dan hibah yayasan. Namun, mereka merasa enggan menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini bukanlah hal yang jarang di antara para jurnalis yang menganut kode etik profesi tentang larangan menerima bantuan dari sumber yang mereka liput. Namun, dari sisi sejarah, keterlibatan pemerintah baik secara domestic atau internasional, tidak selalu menyebabkan sensor atau menghalangi independensi pers. Lalu, para partisipan kesulitan untuk menentukan mana yang bantuan pemerintah, mana yang tidak. Periklanan tidak dianggap sebagai subsidi, tapi di sisi lain itulah jenis dukungan pemerintah yang direkomendasikan oleh *Federal Communications Commission (FCC)* pada

2011. Tiga partisipan juga mengaku beroperasi dengan dana universitas negara, tapi mereka tidak melihat hubungan tersebut sebagai konflik kepentingan atau sebagai hal yang akan menimbulkan sensor.

Selain itu, media digital nirlaba sulit untuk sama sekali tidak bisa berhubungan dengan bantuan pemerintah. Walaupun banyak pihak, termasuk Komisi Kebebasan Pers yang menjadi cikal bakal teori pers tanggung jawab sosial, menyarankan agar institusi nirlaba membantu pers untuk menjalankan misi edukasi dan pelayanan publik. Namun, institusi nirlaba, terutama lembaga penyiaran publik, menerima dana dari pemerintah secara langsung. Jadi secara teknis, pers tetap menerima dana dari pemerintah. Menolak untuk menerima dana sama sekali dari pemerintah terlihat tidak mungkin dan tidak perlu untuk dilakukan.

Status nirlaba juga memiliki kekurangan. Setengah partisipan merasa menyesal tidak bisa menarik dana dari investor swasta, sumber pendapatan yang jika hilang akan sangat merugikan outlet media digital nirlaba. Negara seharusnya mungkin mengeksplorasi model laba-rendah untuk organisasi berita, yang akan memungkinkan penggabungan investasi publik dan swasta dengan masih memprioritaskan misi pelayanan publik. Namun, solusi ini mungkin hanya bisa berlaku di area metropolitan, area di mana investor potensial bisa ditemukan.

Pada akhirnya, walaupun media komersial yang dimiliki korporasi secara sejarah ditemukan tidak konsisten dalam melakukan praktik tanggung jawab sosial dan mengawasi gerak-gerik pemerintah, media digital nirlaba yang dikelola oleh komunitas selalu terjerat dalam masalah keuangan. Selama para jurnalis yang tertarik membentuk organisasi berita yang bertujuan melayani publik belum menerima bantuan yang cukup, pendanaan media

berita komunitas yang independen akan selalu diserahkan kepada pasar, kedermawanan para filantropi, dan harapan akan adanya bantuan oleh publik.

Relevansi penelitian terdahulu ini dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik melaksanakan teori pers tanggung jawab sosial sangat tergantung dengan masalah pendanaan. Walaupun media digital nirlaba, media yang tersedia secara gratis adalah salah satu ciri-ciri media yang menganut teori pers tanggung jawab sosial menurut McQuail (2010, p. 226), tidak bisa dilupakan bahwa hal tersebut berpotensi mengakibatkan media tersebut mengalami masalah keuangan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan apakah media yang menganut teori pers tanggung jawab sosial memang harus tersedia secara gratis seperti yang dikemukakan McQuail.

Hal ini memperkuat justifikasi untuk melihat implementasi teori pers tanggung jawab sosial pada media *online* berbayar *Kompas.id*. Hal ini karena *Kompas.id* memakai model berlangganan yang tentunya tidak tersedia secara gratis, tetapi salah satu alasan berdirinya adalah masalah aksesibilitas yang merupakan salah satu syarat pers yang menganut teori pers tanggung jawab sosial menurut Komisi Kebebasan Pers (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.87-91). Walaupun secara inheren model berlangganan *Kompas.id* bertentangan dengan ciri-ciri teori pers tanggung jawab sosial, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui secara pasti tanggapan *Kompas.id* terkait teori pers tanggung jawab sosial. Kondisi pers yang memerlukan uang menjadikan anggapan bahwa *Kompas.id* secara inheren tidak menganut teori pers tanggung jawab sosial adalah kesimpulan yang terlalu cepat.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
-----	-------	------------------	-----------

1.	Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat	TVRI belum bisa melakukan fungsinya sebagai media yang bertanggung jawab kepada masyarakat secara sepenuhnya karena masih bergantung dengan pemerintah.	Penggunaan enam ciri-ciri teori pers tanggung jawab sosial menurut McQuail (2010, p.226) sebagai panduan wawancara subjek riset dalam metode penelitian.
2.	Social Responsibility Theory of the Press and Its Effect on Framing TV News about Children	Adanya peningkatan implementasi teori pers tanggung jawab sosial pada media di Filipina selama satu dekade terakhir. Jurnalis telah sadar akan faktor etis dalam meliput anak-anak, tetapi kurang konsisten dalam mengikuti panduan UNICEF	Pemilihan jurnalis sebagai subjek riset untuk melihat tingkat implementasi teori pers tanggung jawab sosial pada media. Mewawancarai jurnalis bisa menjadi rujukan untuk mengetahui sadar atau tidaknya mereka akan teori pers tanggung jawab sosial atau perspektif baru terkait teori tersebut.

3.	Social responsibility theory and the digital nonprofits: Should the government aid <i>online</i> news startups?	Media digital nirlaba adalah salah satu bentuk media yang menganut teori pers tanggung jawab sosial. Namun, media-media ini mengalami masalah finansial. Pendanaan Media digital nirlaba akan selalu bergantung dengan pasar, kedermawanan filantropi, dan bantuan publik.	Menjadi justifikasi untuk mempertimbangkan bahwa belum tentu media <i>online</i> yang berbayar tidak mengindahkan teori tanggung jawab sosial sehingga <i>Kompas.id</i> layak untuk diteliti implementasi teori tanggung jawab sosialnya. Hal ini karena media yang berbentuk nirlana cenderung mengalami kesulitan finansial.
----	---	--	--

## 2.2 Teori dan Konsep

### 2.2.1 Teori pers tanggung jawab sosial

Teori pers tanggung jawab sosial adalah teori ketiga dari empat teori yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson and Schramm dalam buku mereka *Four Theories of the Press* pada 1956. Empat teori yang ada di dalam buku itu adalah teori pers otoriter, teori pers libertarian, teori pers tanggung jawab sosial, dan teori pers soviet komunis. Teori

pers tanggung jawab sosial adalah teori yang merupakan bentuk perkembangan dari teori pers libertarian pada abad 20. Premis utama teori pers tanggung jawab sosial adalah kebebasan ada bersama kewajiban dan pers, yang memiliki privilese di bawah pemerintah, memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk melaksanakan fungsi komunikasi massal esensial tertentu dalam masyarakat kontemporer (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.74).

Teori pers tanggung jawab sosial berbeda dengan teori pers libertarian yang menganggap bahwa publik memiliki hak memperoleh informasi atau mewajibkan media memiliki tanggung jawab moral. Media dianggap sebagai badan swasta yang tidak memiliki kewajiban kepada masyarakat. Media adalah properti punya pemiliknya, yang menjual produk dengan risikonya sendiri (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.73).

Asal mula teori pers tanggung jawab sosial dimlai dengan dibentuknya Komisi Kebebasan Pers di Amerika Serikat sebagai respons atas banyaknya kritik terhadap pers di Amerika Serikat karena medianya marak dengan sensasionalisme dan komersionalisme, serta tendensi ketidakberimbangan politik dan monopoli (McQuail, 2010, p.224).

Komisi swasta ini dibentuk pada 1942 dan melaporkan pada 1947. Komisi tersebut mengkritik media karena sering gagal dan menyediakan akses yang sangat terbatas, kecuali bagi kelompok yang memiliki privilese dan minoritas yang memiliki kuasa. Laporan komisi memulai gagasan teori pers tanggung jawab sosial dan standar jurnalistik utama yang harus dipertahankan oleh media (McQuail, 2010, p. 225). Standar itu adalah syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada publik sebagai berikut.

1. Memberitakan peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap, dan konteks yang bermakna. Syarat ini menuntut agar pers melakukan pekerjaan dengan akurat dan tidak berbohong. Pers harus bisa mengidentifikasi opini sebagai opini dan fakta sebagai fakta.
2. Memberikan pelayanan sebagai forum bertukar komentar dan kritik. Syarat ini menuntut pers harus bisa membawakan pandangan yang bertentangan dengan pandangannya sendiri tanpa meninggalkan hak mereka sendiri untuk melakukan advokasi. Pers harus mencoba mewakili semua sudut pandang yang ada, bukan hanya milik penerbit. Alasan poin ini adalah akan banyak individu yang tidak mengekspresikan sudut pandangnya di ruang publik jika tidak bisa menggunakan media sebagai platform.
3. Memproyeksikan gambaran yang mewakili suatu kelompok inti dalam masyarakat. Syarat ini menuntut pers menggambarkan suatu kelompok sosial di dalam masyarakat dengan akurat. Contohnya untuk di Amerika Serikat, orang-orang Cina dan Negro. Hal ini karena orang-orang cenderung membuat keputusan berdasarkan penggambaran yang baik dan tidak baik. Dan penggambaran yang tidak akurat dapat menumbangkan penilaian yang akurat. Kode etik film, radio, dan televisi, semuanya menyatakan agar mendesak media untuk menghormati kepekaan kelompok ras dan agama.
4. Bertanggung jawab atas penyajian dan penjelasan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Syarat ini menuntut agar media menghormati nilai-nilai dan kebiasaan tradisional yang diterima oleh masyarakat



5. Mengupayakan akses sepenuhnya dalam peristiwa sehari-hari. Syarat ini menuntut agar pers menjangkau khalayak seluas-luasnya. Wartawan yang dijiwai rasa tanggung jawab, mereka berpendapat bahwa publik memiliki hak untuk mengakses informasi, hak untuk diberi tahu, dan pers adalah agen publik untuk mendobrak hambatan arus bebas berita.

(1) memberitakan peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap, dan konteks yang bermakna, (2) memberikan pelayanan sebagai forum bertukar komentar dan kritik, (3) memproyeksikan gambaran yang mewakili suatu kelompok inti dalam masyarakat, (4) bertanggung jawab atas penyajian dan penjelasan tujuan dan nilai-nilai masyarakat, dan (5) mengupayakan akses sepenuhnya dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.87-91).

Teori pers tanggung jawab sosial menganggap bahwa kepemilikan media adalah bentuk kepercayaan publik, daripada bisnis swasta yang tidak terbatas. Salah satu anggota dalam Komisi Kebebasan Pers, William Hocking (dalam McQuail, 2010, p.228) mengatakan bahwa hak pers untuk merdeka tidak terpisahkan dari hak rakyat untuk memiliki pers yang bebas. Namun, hak rakyat sudah melampaui hal tersebut, sekarang rakyat memiliki hak untuk memiliki pers yang memadai. Hak publik lah yang sekarang perlu diutamakan. Ini lah salah satu dasar fundamental dalam tuntutan akan tanggung jawab. Dasar fundamental yang lain adalah fakta kepemilikan komunikasi massa yang sangat terkonsentrasi, memberikan kuasa hanya bagi sebagian kecil orang. Kekuasaan ini menandakan bahwa media harus dijalankan dengan hati-hati dan dilakukan dengan menghormati orang lain. Gagasan ini cukup berpengaruh pada pers Amerika Serikat, tapi juga pengesahan peraturan tentang penyiaran

di Amerika Serikat. Penyiaran diasumsikan sebagai tanda kepercayaan publik, tunduk pada peninjauan, dan bahkan pencabutan (McQuail, 2010, p.225-226).

Menurut McQuail (2010, p.226), teori pers tanggung jawab sosial memiliki prinsip-prinsip utama sebagai berikut.

1. Media memiliki kewajiban kepada masyarakat dan kepemilikan media adalah tanda kepercayaan publik. Teori pers tanggung jawab sosial melihat kepemilikan media bukan sebagai waralaba swasta yang memiliki wewenang tidak terbatas, melainkan tanda kepercayaan publik. Masyarakat memiliki hak untuk memiliki pers yang baik, pers yang mengutamakan hak publik. Kuasa yang dimiliki oleh media ini harus digunakan dengan penuh kehati-hatian dan menghormati orang lain (McQuail, 2010, p.225-226).
2. Media berita selalu jujur, akurat, adil, objektif dan relevan. Hal ini serupa dengan syarat pertama bagi media yang menganut teori pers tanggung jawab sosial menurut Komisi Kebebasan Pers, yaitu menuntut agar media membuat berita dengan akurat, tidak berbohong, dan bisa memisahkan fakta dan opini (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.87)
3. Media harus bebas, mengelola diri sendiri. Dalam teori pers tanggung jawab sosial, ada tiga sudut pandang untuk meningkatkan performa media. Salah satunya, dari sudut pandang media itu sendiri, media harus merasa memiliki tanggung jawab sebagai pembawa informasi dan diskusi, harus mencoba untuk membawakan kualitas tinggi tanpa keuntungan finansial secepatnya. Dari sudut pandang publik, publik perlu menyadari bahwa media menikmati kekuatan yang luar biasa sehingga memiliki

kewajiban untuk diawasi mengawasi media agar memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mendukung media dengan bantuan institusi nonprofit. Dan terakhir, dari sudut pandang pemerintah, pemerintah perlu mengakui keberadaan media sebagai badan swasta (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.93)

4. Media harus mengikuti kode etik dan profesional yang disepakati. Pada abad ke-20, banyak penerbit mengemukakan bahwa mereka tidak hanya mengemukakan hak mereka untuk memiliki kebebasan, tetapi juga tanggung jawab yang melekat dalam mempraktikkan kebebasan tersebut. Mengikuti ini, kelompok industri media menyusun kode etik masing-masing (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.83). Namun, Komisi Kebebasan Pers menyatakan bahwa kode etik itu sendiri tidak cukup karena kode etik koran misalnya, ditentukan oleh bos, bukan karyawan. Hal ini karena banyak yang menganggap kode etik sebagai standar pencapaian minimum, bukan tanggung jawab yang memiliki tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, Komisi Kebebasan Pers bahwa masyarakat, paling tidak di Amerika Serikat, membutuhkan pers yang memiliki lebih bagus secara variasi, jumlah dan kualitas. Hal ini karena masyarakat sangat bergantung dengan pers. (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956, p.87).
5. Pemerintah boleh mengintervensi untuk menjaga kepentingan publik dalam situasi tertentu. Pada awalnya, Komisi Kebebasan Pers mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial seharusnya diarahkan dengan usaha media itu sendiri, bukan intervensi pemerintah. Namun pada akhirnya, intervensi

pemerintah tidak dianggap tidak diperlukan. Teori pers tanggung jawab sosial menganggap seharusnya pemerintah tidak hanya memperbolehkan kebebasan, tetapi juga secara aktif mengkampanyekan kebebasan itu sendiri. Tindakan pemerintah yang dimaksud meliputi membentuk undang-undang untuk melarang tindakan yang jelas melanggar kebebasan dan memasuki bidang komunikasi untuk membantu media yang sudah ada (McQuail, 2010, p. 225).

Meneliti implementasi teori pers tanggung jawab sosial oleh media *online* berbayar *Kompas.id* adalah hal yang penting jika melihat konsep teori pers tanggung jawab sosial pada awalnya dan mempertimbangkan praktiknya di dunia nyata dengan mengamati penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, konsep teori pers tanggung jawab sosial sudah berumur cukup lama sehingga hanya sempat membahas media tradisional, bukan media baru seperti *Kompas.id* yang harus diakses melalui internet. Kedua, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat poin tertentu di dalam konsep teori pers tanggung jawab sosial yang mungkin perlu dievaluasi, yaitu terkait tidak perlunya media terlalu memperhatikan keuntungan untuk bisa merasa bertanggungjawab kepada masyarakat dengan menyediakan berita berkualitas tinggi. Hal ini karena media digital nirlaba tidak jarang mengalami masalah keuangan dan bahkan harus memutuskan hubungan kerja dengan banyak karyawannya. Terlebih lagi, banyak editor media nirlaba yang merasa menyesal tidak bisa menarik investor swasta. Kemunculan media baru dan keadaan finansial media, kedua hal ini menjadi justifikasi yang relevan untuk mencari tahu implementasi teori pers tanggung jawab sosial oleh media *online* berbayar *Kompas.id*.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan lima prinsip utama dalam teori pers tanggung jawab sosial ini sebagai pedoman pertanyaan wawancara semi-struktur kepada subjek riset. Hal ini karena prinsip utama teori pers tanggung jawab sosial yang ditulis oleh McQuail (2010) lebih relevan secara waktu dibandingkan syarat dan ciri-ciri pers yang menganut teori pers tanggung jawab menurut Komisi Kebebasan Pers di Amerika Serikat (1947). Selain itu, prinsip utama teori pers tanggung jawab sosial menurut McQuail menekankan secara lebih eksplisit bahwa media seharusnya tersedia secara gratis dan mengatur dirinya sendiri, salah satu poin yang menjadi justifikasi penelitian ini karena masalah finansial media nirlaba digital. Masalah ini dikemukakan dalam penelitian terdahulu ke-3 berjudul *Social responsibility theory and the digital nonprofits: Should the government aid online news startups?* oleh Rebecca Coates Nee.

Selain itu, prinsip utama teori pers tanggung jawab sosial menurut McQuail digunakan dalam penelitian terdahulu yang berjudul *Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan Tvri Pusat*, Madrid De Fretes & Retor A.W. Kaligis pada 2020. Dalam penelitian itu, prinsip utama teori pers yang tanggung jawab sosial menurut McQuail digunakan sebagai panduan melakukan wawancara mendalam. Maka dari itu, peneliti dalam penelitian ini memutuskan untuk menggunakan prinsip utama dalam teori pers tanggung jawab sosial yang ditulis oleh McQuail sebagai panduan melaksanakan metode penelitian wawancara mendalam.

### **2.2.2 Paywall**

*Paywall* adalah sistem yang mencegah pengguna internet mengakses konten di dalam situs halaman tanpa berlangganan berbayar. *Paywall* juga mempunyai artian lain, yaitu mekanisme digital untuk memisahkan konten yang harus dibayar sebelum diakses dari

konten lainnya di internet. Latar belakang kemunculan *paywall* pada dunia jurnalistik bisa dilihat pada 2012 di Barat, terutama di Amerika Serikat, ketika media di sana tidak bisa memperoleh pendapatan yang cukup dari iklan. Keuntungan yang diperoleh dari platform digital tidak cukup menutupi kerugian media cetak. Karena ini, tidak mengherankan pemakaian *paywall* oleh media di Barat terlihat meningkat pesat pada 2012 dan 2013 (Myllylahti, 2018, p.181-182).

Faktor yang menyebabkan pembaca mau membayar atau menembus *paywall* untuk memperoleh konten jurnalistik *online* lebih berhubungan dengan khalayak kecil yang tertarik dengan hal yang spesifik. Hal ini meliputi kualitas informasi yang ada, eksklusivitas, nilai lebih, fitur istimewa, seperti animasi, video, grafik, dan lain-lain. Di sisi lain, faktor utama yang menyebabkan pembaca belum mau membayar atau menembus *paywall* adalah sedikitnya nilai lebih. Artinya, jika informasi yang disediakan dengan mudah bisa diperoleh di internet secara gratis, konten jurnalistik tersebut turun nilainya (Marju & Ragne, 2015, p.8).

Namun, di sisi lain, media yang memakai *paywall* belum tentu menyediakan konten jurnalistik yang berbeda jauh dengan konten jurnalistik yang diproduksi media yang tersedia secara gratis. Misalnya di Jerman pada 2011, situs berita nasional *welt.de* mengadopsi penggunaan *paywall* agar pembacanya membayar sebelum mengakses konten situs berita tersebut. Namun, konten jurnalistik di dalam situs *welt.de* ternyata tidak berbeda jauh dengan konten jurnalistik yang tersedia secara gratis oleh media yang tersedia secara gratis (Brandsetter & Schmalhofer, 2014, p.505).

Menurut Myllylahti (2019, p. 182), *paywall* itu sendiri bisa dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut.

1. *Hard/full paywall*. Tidak bisa mengakses konten tanpa berlangganan
2. *Soft paywall*. Beberapa konten tersedia secara gratis
3. *Metered paywall*. Membatasi jumlah artikel yang tersedia secara gratis
4. *Freemium paywall*. Beberapa konten tersedia secara gratis, konten premium tidak bisa diakses tanpa membayar.

Media *online* berbayar yang diteliti dalam penelitian ini, *Kompas.id*, mengadopsi pendekatan *freemium* atau gratis akses terhadap berita-berita di tab “Bebas Akses” dengan ketentuan hanya perlu melakukan registrasi. Sebagian konten *Kompas.id* tersedia secara gratis, dan jika ingin mengakses lebih banyak konten *Kompas.id*, pembaca harus berlangganan terlebih dahulu (Kompas, 2018).

Menyoroti pemakaian *paywall* oleh *Kompas.id* adalah hal yang penting. Hal ini karena penelitian ini meneliti tingkat implementasi teori pers tanggung jawab sosial oleh *Kompas.id*. Dan salah satu ciri media yang menganut teori pers tanggung jawab sosial menurut McQuail (2010, p.226) adalah tersedia secara gratis. Pemakaian *paywall* tentu bertentangan dengan salah satu ciri ini.

### **2.2.2 Media baru**

Media baru adalah sekumpulan teknologi informasi yang selain baru, memiliki fungsi yang serupa, dan dimungkinkan karena digitalisasi dan tersedia secara luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Kemunculan media baru dan penggunaannya berdampak secara langsung dan tidak langsung pada media ‘tradisional’. Sebagian besar fokus penggunaan kolektif media baru berpusat pada internet, terutama penggunaan oleh publik, seperti berita *online*, iklan, aplikasi penyiaran, aktivitas forum dan diskusi, jaringan sejagat (*World Wide Web*), pencarian informasi dan potensi membentuk komunitas

(McQuail, 2010, p.179). Internet itu sendiri, dinilai memiliki kekuatan inheren anarki dibandingkan media tradisional. Tidak ada ‘penjaga gerbang’ (*gatekeeper*) konten dan bentuk informasi yang biasanya dijaga oleh media besar selama beberapa dekade lalu. Siapa pun yang memiliki akses internet bisa menjadi penulis bagi diri mereka sendiri, mengekspresikan identitas diri mereka sendiri melalui internet (Barr dalam Holmes, 2005, p.8).

Di sisi lain, media tradisional sudah lama dikritisi karena cenderung memiliki bias pemberitaan yang bertolak belakang dengan peran media sebagai institusi sosial. Media tradisional terlalu terpengaruh kepentingan ekonomi, menutup prinsip objektivitas dalam memberitakan isu politik. Di negara demokratis, deregulasi karena liberalisasi ekonomi dan politik membuat media semakin memprioritaskan kapital. Dan sebaliknya di negara totaliter, media mengalami pembungkaman dan menjadi alat propaganda penguasa (Simarmata, 2019, p.19)

Kemunculan media baru memberikan dampak yang unik terhadap masing-masing pihak yang berbeda. Bagi para penulis, kesempatan mereka semakin besar karena internet. Hal ini karena mengunggah suatu konten di internet terhitung sebagai melakukan publikasi. Namun, kondisi untuk meraih status yang lebih tinggi seperti pengakuan oleh publik, masih tetap sama dengan teknologi baru. Tidak mudah untuk menjadi dikenal banyak orang di internet tanpa bantuan media massa tradisional. Bagi para penerbit, sebelum munculnya media baru, kebanyakan penerbit berperan sebagai organisasi nirlaba atau perusahaan bisnis. Dengan adanya media baru, penerbit dapat melakukan penerbitan dengan bentuk alternatif, dan memiliki kesempatan baru dan menyediakan tantangan bagi media tradisional. Fungsi media tradisional melakukan *gatekeeping*, melakukan intervensi



editorial dan validasi kepenulisan, masih akan ada dalam publikasi di internet, tetapi tidak semuanya (McQuail, 2010, p.184).

Salah satu perbedaan lain di antara media tradisional dan media baru adalah konten yang tersedia di dalam masing-masing media. Media baru mencerminkan gabungan di antara banyak media, yaitu media audio, media audio-visual, dan media cetak sekaligus (Rianto, 2016, p.90). Internet menggabungkan media radio, film, dan televisi, lalu mendistribusikan konten yang dibuat menggunakan teknologi baru. Hal ini mengakibatkan media baru dapat melampaui keterbatasan media cetak dan penyiaran (McQuail, 2010, p.185-186).

Berdasarkan penjelasan mengenai media baru di atas, tentu *Kompas.id* adalah salah satu bentuk media baru. *Kompas.id* adalah portal digital *Harian Kompas*, koran media cetak yang berdiri sejak 1965 yang terdampak dari turunnya tren media cetak. *Kompas.id* ini diharapkan bisa menjawab tantangan-tantangan di era digital. Mereka yang membeli paket langganan *Kompas.id* akan bisa mengakses konten media tersebut, meliputi dalam bentuk audio, audio-visual, dan cetak (Leksono & Gita, 2017, p.4-8).

Menganggap *Kompas.id* sebagai media baru adalah hal yang penting dalam penelitian ini. Hal ini karena penelitian terdahulu yang meneliti implementasi teori pers tanggung jawab sosial (Retor & Kaligis, 2020), meneliti media tradisional, yaitu TVRI yang menggunakan televisi sebagai medium utamanya. Melalui penelitian ini, bisa diketahui apakah ada perbedaan di antara media baru dan media tradisional dalam mengimplementasi teori pers tanggung jawab sosial.

## 2.3 Alur Penelitian

Keberadaan media *online* tidak jarang dianggap sebagai salah satu tanda bentuk kemajuan teknologi yang membuat lebih banyak orang mengonsumsi konten media *online*. Namun pada kenyataannya, media *online* yang tersedia banyak yang meninggalkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat melalui penulisan judul *clickbait*. Motifnya adalah untuk memenuhi pendapatan yang hilang dari turunnya tren media cetak. Untuk itu, beberapa media, salah satunya adalah media *online* berbayar *Kompas.id*, menggunakan model berlangganan untuk menangani masalah keuangan tersebut. Namun, untuk bertanggungjawab kepada masyarakat, menurut teori pers tanggung jawab sosial, media seharusnya tersedia secara gratis dan mengatur dirinya sendiri. Tentunya, hal tersebut bertentangan dengan model berlangganan yang diadopsi *Kompas.id*.

Namun, media digital nirlaba, walaupun dianggap sebagai simbol pelaksanaan teori tanggung jawab sosial, sebenarnya cukup rentan dari sisi finansial sehingga banyak memecat karyawannya sendiri. Terlebih lagi, teori tanggung jawab sosial disusun ketika media yang ada masih merupakan media tradisional, bukan media baru yang perlu diakses melalui internet.

Maka dengan itu, kedua hal di atas menjadi justifikasi melakukan penelitian untuk mencari tahu implementasi teori pers tanggung jawab sosial oleh *Kompas.id*. Untuk itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, teori pers tanggung jawab sosial, dan metode wawancara semistruktur. Teori pers tanggung jawab sosial yang dipakai adalah konsep teori pers tanggung jawab sosial menurut McQuail (2010, p.226). Menurut McQuail, teori pers tanggung jawab sosial memiliki lima ciri-ciri utama: (1) Media memiliki kewajiban kepada

masyarakat dan kepemilikan media adalah tanda kepercayaan publik, (2) Media berita selalu jujur, akurat, adil, objektif dan relevan, (3) Media harus gratis, tapi mengelola diri sendiri, (4) Media harus mengikuti kode etik dan profesional yang disepakati, dan (5) Pemerintah boleh mengintervensi untuk menjaga kepentingan publik dalam situasi tertentu.

Lima ciri-ciri utama dalam teori pers tanggung jawab sosial ini menjadi pedoman dalam melakukan wawancara semistruktur kepada partisipan penelitian, yaitu Direktur *Kompas.id*, Sutta Dharmasaputra dan jurnalis *Kompas.id*. Berdasarkan hasil wawancara, akan bisa diketahui implementasi teori pers tanggung jawab sosial sudah sejauh apa oleh *Kompas.id*. Setelahnya, bisa diketahui juga anggapan partisipan penelitian terkait relevansi teori pers tanggung jawab sosial dan arti teori itu sendiri menurut mereka.

Dengan melakukan wawancara semistruktur, peneliti bermaksud untuk menanyakan terkait implementasi ciri-ciri teori pers tanggung jawab sosial menurut McQuail (2010, p.226) kepada subjek riset yang bekerja untuk *Kompas.id*. Ciri-ciri teori pers tanggung jawab sosial adalah pedoman permasalahan yang akan ditanyakan, berperan sebagai landasan dalam melakukan wawancara. Setelahnya, hasil wawancara akan diubah menjadi data dan ditariklah kesimpulan apakah *Kompas.id* mengimplementasikan teori pers tanggung jawab sosial atau tidak.

**Gambar 2.2 Bagan Alur Penelitian**



